

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : CHRISTINA MAGDALENA

NIM : 127151015

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

2017

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : CHRISTINA MAGDALENA
NO. MAHASISWA : 127151015
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS : PENGARUH PERSEPSI KEADILAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI

Jakarta, 20 Desember 2017

Pembimbing



Dr. Jonnardi, Drs, MM., Ak., BAP

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS
SETELAH LULUS UJIAN TESIS

NAMA : CHRISTINA MAGDALENA

NIM : 127151015

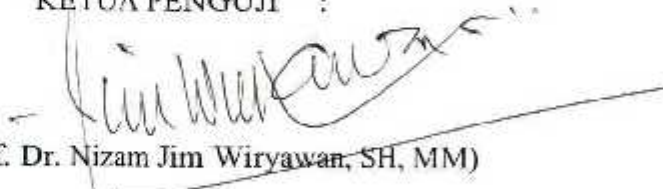
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI

MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN

JUDUL TESIS : PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


TANGGAL : 20 DES 2017

KETUA PENGUJI :


(Prof. Dr. Nizam Jim Wiryawan, SH, MM)

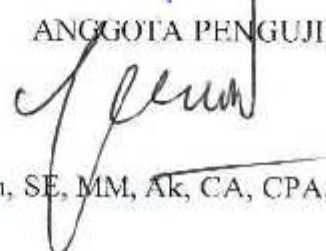
TANGGAL : 20 DES 2017

ANGGOTA PENGUJI :


(Dr. Jonnardi, drs, MM., Ak., BAP)

TANGGAL : 20 DES 2017

ANGGOTA PENGUJI :


(Dr. Herman Ruslim, SE, MM, Ak, CA, CPA, MAPPI (Cert.))

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya Mahasiswa Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Nama : Christina Magdalena

NIM : 127151015

Program : Magister Akuntansi

Dengan ini menyatakan tugas akhir (Tesis) yang saya buat dengan judul:

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Adalah:

1. Dibuat sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan referensi acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas saya.
2. Tidak merupakan hasil duplikat tesis yang telah dipublikasikan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Akuntansi di Universitas lain kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Tidak merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku dan referensi acuan yang tertera dalam referensi pada tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka tugas akhir ini batal.

Jakarta, Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan



Christina Magdalena

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya. Tesis ini dapat terselesaikan hanya oleh karena anugerahNya.

Tesis dengan judul “PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI” ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Magister Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak terkait, tesis ini tidak akan rampung pada waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu peneliti ingin berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam proses penulisan tesis, di antaranya:

- 1) Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE., MM., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
- 2) Dr. Herman Ruslim, SE., MM., Ak., CA, CPA, MAPPI (Cert.), selaku Ketua Program Magister Akuntansi.
- 3) Dr. Jonnardi, drs, MM., Ak., BAP , atas bimbingan dan waktu yang diberikan selama proses pembuatan tugas akhir.
- 4) Dr. Jonathan Sarwono, atas arahnya dalam pengolahan data.

- 5) Seluruh dosen Magister Akuntansi, atas pengetahuan yang telah dibagikan selama proses perkuliahan.
- 6) Seluruh staf Universitas Tarumanagara, atas bantuannya dalam hal administrasi.
- 7) Keluarga, atas motivasi dan bantuan yang telah diberikan.
- 8) Christian Hadi Wibowo, Indah Iskandar, Oktavia Rosiana, Michiko, Rani Priscillia dan teman-teman lainnya atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis.
- 9) Teman-teman angkatan 2015 Maksi Universitas Tarumanagara, atas kebersamaan dan persahabatan selama proses perkuliahan.
- 10) Responden dalam kuesioner, atas partisipasinya dalam penelitian.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini akan peneliti terima. Besar harapan peneliti agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 20 Desember 2017

Peneliti

Christina Magdalena

TAX FAIRNESS PERCEPTION ON INDIVIDUAL TAX COMPLIANCE

Abstract

The main source of state revenue comes from the taxation aspect. This state revenue is used for national development to improve people's welfare. State revenue from the tax sector tends to increase from year to year, but the realization of tax revenue is always below target. This indicates that there are still many taxpayers who have not carried out their tax obligations so that the target of tax revenue is not met. One of the factors that affecting tax compliance is the fairness perception. This research aims to examine the effect of general fairness, exchange with government, self interest and special provisions on tax compliance. Questionnaire is used for collecting the data. This research used 100 taxpayers who work independently and registered at tax office (KPP) in Jakarta as sample. The data in this study were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with the aid of SmartPLS application. The result of this study indicates that general fairness and self interest have positive and significant effect on tax compliance, while exchange with government and special provisions have positive but not significant effect on tax compliance.

Keywords: general fairness, exchange with government, self interest, special provisions, tax compliance

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Abstrak

Sumber utama penerimaan negara berasal dari aspek perpajakan. Penerimaan negara ini digunakan untuk pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penerimaan negara dari sektor pajak cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target. Hal ini mengindikasikan masih banyak pembayar pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tidak terpenuhi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi dan ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan pajak. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan 100 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) di Jakarta sebagai sampel. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan umum dan kepentingan pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan timbal balik pemerintah dan ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata kunci: keadilan umum, pertukaran dengan pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan khusus, kepatuhan pajak

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 <i>Grand Theory</i>	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	12
2.2 <i>Middle Theory</i>	15

2.2.1 <i>Attribution Theory</i>	15
2.2.2 Teori Pemungutan Pajak.....	17
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak.....	19
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak	20
2.3 <i>Applied Theory</i>	21
2.3.1 Persepsi Keadilan Pajak.....	22
2.3.2 Kepatuhan Pajak.....	25
2.4 Kaitan Antar Variabel	27
2.4.1 Keadilan Umum Terhadap Kepatuhan Pajak	27
2.4.2 Timbal Balik Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak.....	27
2.4.3 Kepentingan Pribadi Terhadap Kepatuhan Pajak	28
2.4.4 Ketentuan-Ketentuan Khusus Terhadap Kepatuhan Pajak.....	29
2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Desain Penelitian	38
3.2 Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	39
3.3 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	40
3.3.1 Variabel Laten	40
3.3.2 Variabel Teramati.....	43
3.4 Uji Reliabilitas dan Validitas Kuesioner	46
3.4.1 Uji Reliabilitas Kuesioner	46
3.4.2 Uji Validitas Kuesioner	46

4.4.3.4 Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Ketentuan- Ketentuan Khusus.....	94
4.4.3.5 Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak	96
4.4.4 Analisa Persamaan Model Pengaruh (<i>Outer Model</i>).....	97
4.5 Pengujian Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	106
4.5.1 Analisa Pengaruh Antar Konstruk.....	106
4.5.2 Variabilitas Model Penelitian	108
4.5.3 Analisa Persamaan Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	111
4.6 Uji Hipotesis.....	112
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 119
5.1 Kesimpulan.....	119
5.2 Saran.....	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	43
Tabel 3.2 Skala Likert	46
Tabel 3.3 Kriteria Pengukuran Model Struktural.....	51
Tabel 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	57
Tabel 4.2 Uji Validitas Variabel Keadilan Umum.....	64
Tabel 4.3 Uji Validitas Variabel Timbal Balik Pemerintah.....	65
Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel Kepentingan Pribadi	66
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Ketentuan-Ketentuan Khusus	67
Tabel 4.6 Uji Validitas Kepatuhan Pajak	68
Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Variabel Keadilan Umum	69
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas Variabel Timbal Balik Pemerintah	69
Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Variabel Kepentingan Pribadi.....	70
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Variabel Ketentuan-Ketentuan Khusus	70
Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Pajak	71
Tabel 4.12 Statistik Deskriptif	72
Tabel 4.13 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Keadilan Umum	75
Tabel 4.14 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Keadilan Umum.....	76
Tabel 4.15 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Timbal Balik Pemerintah	78
Tabel 4.16 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Timbal Balik Pemerintah	79
Tabel 4.17 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Kepentingan Pribadi.....	80
Tabel 4.18 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Kepentingan Pribadi	81

Tabel 4.19 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Ketentuan-Ketentuan Khusus.....	81
Tabel 4.20 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Eksogen Ketentuan-Ketentuan Khusus.....	83
Tabel 4.21 Nilai <i>Loading Factor</i> Konstruk Endogen Kepentingan Pribadi	85
Tabel 4.22 Nilai <i>Cross Loading</i> Konstruk Endogen Kepentingan Pribadi.....	86
Tabel 4.23 Nilai <i>AVE</i> dan \sqrt{AVE} Setiap Konstruk	87
Tabel 4.24 Perbandingan \sqrt{AVE} Seluruh Konstruk.....	87
Tabel 4.25 Hasil Uji Reliabilitas.....	90
Tabel 4.26 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Keadilan Umum.....	91
Tabel 4.27 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Timbal Balik Pemerintah.....	92
Tabel 4.28 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Kepentingan Pribadi	94
Tabel 4.29 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Eksogen Ketentuan-Ketentuan Khusus.....	95
Tabel 4.30 Nilai t-statistik Pengujian Signifikansi Indikator Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak	96
Tabel 4.31 Nilai <i>Path Coefficient</i>	106
Tabel 4.32 Nilai <i>R-square</i> (R^2)	109
Tabel 4.33 <i>Effect Size</i> (f^2)	110
Tabel 4.34 Pengujian Hipotesis	113
Tabel 4.35 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Penelitian Sebelumnya	118

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 APBN 2017	1
Gambar 1.2 Tax Ratio Negara Asean Tahun 2015	3
Gambar 2.1 Kerangka <i>Theory of Planned Behavior</i>	4
Gambar 2.2 Model Penelitian	36
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran	52
Gambar 4.1 Usia Responden	58
Gambar 4.2 Jenis Kelamin Responden	59
Gambar 4.3 Tingkat Pendidikan Responden	60
Gambar 4.4 Penghasilan Tahunan Responden	61
Gambar 4.5 Pengalaman Pengisian SPT	62
Gambar 4.6 Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar	63
Gambar 4.7 Diagram Jalur Model Penelitian	74
Gambar 4.8 <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Keadilan Umum	74
Gambar 4.9 <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Timbal Balik Pemerintah	77
Gambar 4.10 <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Kepentingan Pribadi	80
Gambar 4.11 <i>Loading Factor</i> Konstruk Eksogen Ketentuan-Ketentuan Khusus	82
Gambar 4.12 <i>Loading Factor</i> Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak	85
Gambar 4.13 Signifikansi Konstruk Eksogen Keadilan Umum	91
Gambar 4.14 Signifikansi Konstruk Eksogen Timbal Balik Pemerintah	92
Gambar 4.15 Signifikansi Konstruk Eksogen Kepentingan Pribadi	93
Gambar 4.16 Signifikansi Konstruk Eksogen Ketentuan-Ketentuan Khusus	95
Gambar 4.17 Signifikansi Konstruk Endogen Kepatuhan Pajak	96

Gambar 4.18 Diagram <i>Path Coefficient</i>	107
Gambar 4.19 Hasil <i>PLS Algorithm</i>	109

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Kuesioner

Lampiran B. Rekapitulasi Data Kuesioner

Lampiran C. Hasil *PLS Algorithm*

Lampiran D. Hasil *Bootstrapping*

Lampiran E. Tabel *t*

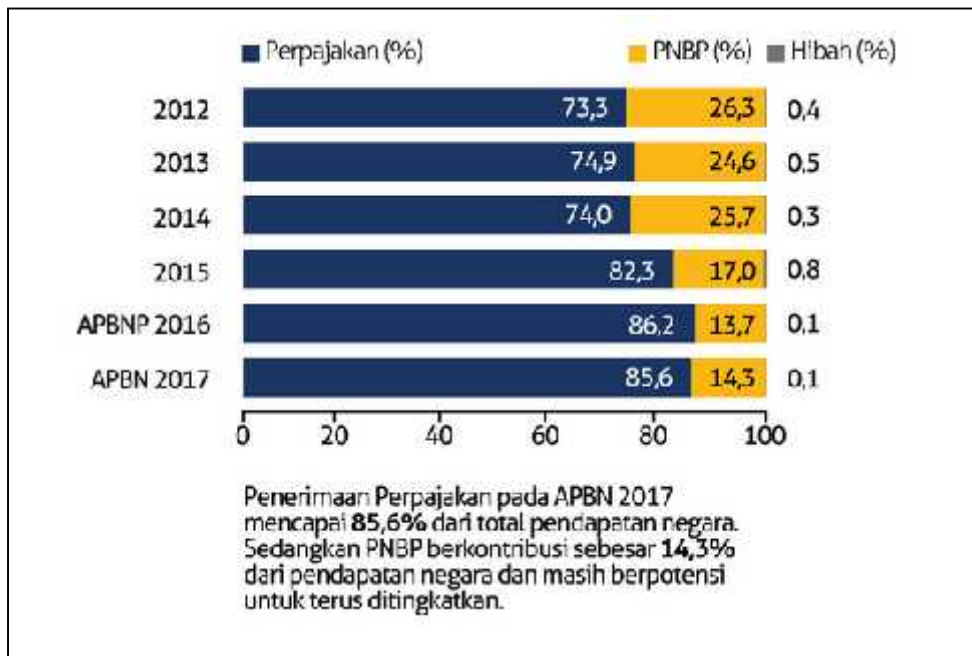
Lampiran F. Tabel *r*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting bagi terlaksananya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 86,2% di tahun 2016 dan 85,6% di tahun 2017. Sedangkan penerimaan negara dari sektor lainnya hanya sebesar 13,8% di tahun 2016 dan 14,4% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan negara yang utama berasal dari penerimaan pajak.



Gambar 1.1

APBN 2017

(Sumber: <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>)

Penerimaan negara dari sektor perpajakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi realisasi penerimaan pajak selalu di bawah target. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, dalam Liputan6.com tanggal 31 Januari 2017 yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar tahun 2016 mencapai 32,77 juta WP, sementara jumlah WP terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio kepatuhan pajak sebesar 72,50% dan target kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 14,62 juta WP. Namun, realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta WP dan rasio kepatuhan pajak 63,16%, sedangkan rasio pajak Indonesia yaitu hanya sebesar 10,3% di tahun 2016, dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang bisa mencapai 15%. Hingga sekarang, masih terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima.

Hal ini juga diperkuat dengan berdasarkan data tax ratio dari OECD tahun 2015. Dapat dilihat pada gambar 1.2., bahwa tax ratio Indonesia hanya sebesar 11,8%, tax ratio tersebut masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia yang sudah mencapai 13,6% dan 15,3%.



Gambar 1.2

Tax Ratio Negara Asean Tahun 2015

(Sumber: <http://www.oecd.org/ctp/revenue-statistics-in-asian-countries-2016-9789264266483-en.htm>)

Kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak dan meningkatkan tax ratio. Tidak selamanya wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan menghambat penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan khususnya wajib pajak orang pribadi non-karyawan dengan harapan bila kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditingkatkan, maka akan mendorong wajib pajak lainnya untuk patuh sehinggadapat meningkatkan tax ratio serta penerimaan negara.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pemahaman atas peraturan perpajakan, kompleksitas perpajakan, sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus.

Pemahaman atas peraturan perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Peraturan perjakan yang sulit dimengerti menyebabkan wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan banyak pula wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan tetapi mereka justru mencari celah untuk menghindari pajak (Nugraheni, 2015).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kompleksitas perpajakan, diantaranya adalah peraturan perpajakan yang sering berubah dan sulitnya pengisian SPT membuat wajib pajak lebih memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menurunkan tingkat kepatuhan pajak, untuk itu pemerintah harus memberikan sosialisasi terkait peraturan perjakan serta pengisian SPT agar masyarakat tidak kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan pajak (Nugraheni, 2015).

Sanksi pajak merupakan suatu jaminan agar peraturan perundang-undangan pajak dipatuhi. Sanksi pajak diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak agar mereka mau bertindak sesuai dengan peraturan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dengan pemberian sanksi yang tegas dan sesuai prosedur menurut besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan (Nugraheni, 2015).

Faktor lainnya adalah kualitas pelayanan fiskus. Banyak wajib pajak yang memiliki pandangan negatif terhadap fiskus, terlebih setelah adanya kasus penggelapan pajak oleh Gayus Tambunan pada tahun 2011 yang mengakibatkan

penurunan kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak. Masyarakat menilai pajak yang disetorkan tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat akan merasa enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah harus mengupayakan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus yang profesional dan bertanggung jawab agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugraheni, 2015).

Selain faktor-faktor yang disebutkan diatas, terdapat beberapa faktor persepsi keadilan yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi serta ketentuan-ketentuan khusus.

Keadilan umum dalam hal ini merupakan persepsi apakah pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan sudah didistribusikan dengan tepat. Beban pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila pajak yang harus dibayarkan melebihi kemampuan wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Natrah, 2009). Pemerintah sudah mengupayakan agar pajak penghasilan dibebankan secara adil bagi wajib pajak orang pribadi dengan memberlakukan tarif pajak progresif dalam perhitungan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima wajib pajak, beban pajak yang ditanggung dan harus dibayarkan juga semakin tinggi. Namun, dengan semakin tingginya pajak yang dibayarkan wajib pajak, akan mengurangi niat mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka akan mencari celah untuk tidak melaporkan penghasilannya atau mengurangi beban pajak

dengan tidak melaporkan seluruhnya pendapatan mereka (Berutu dan Harto, 2012).

Timbal balik pemerintah merupakan timbal balik yang diberikan pemerintah atas pembayaran pajak yang telah dilakukan wajib pajak. Atas pembayaran pajak yang telah dilakukan, wajib pajak menginginkan fasilitas publik yang memadai serta tatanan birokrasi yang baik yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jika pemerintah memberikan timbal balik yang sesuai dengan pajak yang telah dibayarkan wajib pajak, maka dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan dengan demikian meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Saraswati dan Inasius, 2014). Namun, pada kenyataannya, masyarakat beranggapan bahwa kewajiban perpajakan memiliki karakteristik hubungan searah. Masyarakat diharuskan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, namun pembangunan serta pengadaan fasilitas umum masih tidak merata. Hal ini menyebabkan masyarakat menempuh berbagai upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar atau tidak membayar pajak sama sekali.

Kepentingan pribadi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Wajib pajak akan membandingkan apakah beban pajak yang dibayarkan dibandingkan beban wajib pajak lainnya lebih tinggi. Ketika wajib pajak membandingkan pendapatan mereka dengan orang lain, mereka akan memiliki suatu penilaian dan pertimbangan yang dapat membuat mereka sadar penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya atau malah enggan untuk melaksanakannya (Natrah, 2009).

Faktor lainnya adalah ketentuan-ketentuan khusus. Wajib pajak tertentu diberikan ketentuan khusus atau pengurangan dalam pembayaran pajak mereka. Hal ini diberlakukan dengan harapan agar meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, di sisi lain ketentuan-ketentuan khusus ini juga memberikan paradigma negatif bagi wajib pajak lainnya karena dianggap pemerintah tidak adil dan hanya mendukung sebagian masyarakat (Saraswati dan Inasius, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Sumber penerimaan utama negara berasal dari aspek perpajakan. Penerimaan negara ini digunakan untuk pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan pajak harus terus ditingkatkan agar penerimaan negara atas perpajakan juga semakin meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan negara atas perpajakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.
2. Penerimaan negara dari sektor perpajakan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan pajak selalu dibawah target. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum

melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tidak terpenuhi.

3. Berdasarkan data dari OECD tahun 2015, tax ratio Indonesia hanya sebesar 11,8% masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang sudah mencapai 13,6% dan 15,3% yang berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia masih sangat rendah.
4. Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti pemahaman atas peraturan perpajakan, kompleksitas perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, serta ketentuan-ketentuan khusus.
5. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu juga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan Natrah (2009) yang menguji pengaruh persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Malaysia dengan melakukan modifikasi variabel serta populasi yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian terdahulu menguji pengaruh keadilan umum, timbal balik pemerintah, keadilan horizontal, keadilan vertikal, keadilan retibutif, kepentingan pribadi, serta keadilan administratif terhadap kepatuhan pajak dengan mengambil sampel sebanyak 2.267 wajib pajak orang pribadi di Malaysia (Natrah, 2009).

Hasil penelitian diperoleh bahwa keadilan umum, timbal balik pemerintah, dan kepentingan pribadi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keadilan horizontal berpengaruh secara negatif terhadap

kepatuhan pajak. Sedangkan keadilan vertikal, keadilan retributif, serta keadilan administratif tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian direplikasi kembali.

1.3 Pembatasan Masalah

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada 4 (empat) variabel independen yang digunakan yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, kepentingan pribadi, serta ketentuan-ketentuan khusus; serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pematasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan umum berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah timbal balik pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah kepentingan pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk:

1. Menguji pengaruh keadilan umum terhadap kepatuhan pajak.
2. Menguji pengaruh timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan pajak.
3. Menguji pengaruh kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pajak.
4. Menguji ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan pajak.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Penulis, agar dapat memperkaya pengetahuan ilmiah mengenai pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak, serta sebagai syarat kelulusan program Magister Akuntansi.
- b. Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan tentang perpajakan.
- c. Peneliti selanjutnya, agar dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai kepatuhan pajak.
- d. DJP dan pemerintah Indonesia, agar dapat dijadikan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Advianto, L. Y. H. S. (2014). *Bukti Audit Kompeten dalam Pemeriksaan Pajak dan Pembuktian dalam Sengketa Pajak*. Retrieved from <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20210-bukti-audit-kompeten-dalam-pemeriksaan-pajak-dan-pembuktian-dalam-sengketa-pajak#ftn4>
- Aedi, N. (2010). *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Retrieved from http://file.upi.edu/Direktori/DUALMODES/PENELITIAN_PENDIDIKA_N/BBM_8.pdf
- Ahmad, S., Aftab, M., & Rehman, K. (2010). *Moderating Effect of Social Support on Personal Financial Constraints and Job Stress Relationship*. Retrieve from https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/36442/1/MPRA_paper_36442.pdf
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2), 179-211.
- Ali, M., Mustafa, H., & Asri, M. (2007). *The Effects of Knowledge on Tax Compliance Behavior Among Malaysian Taxpayer*. International Conference of Business and Information. July 11-13, 2007. Tokyo, Japan. Retrieved from <http://ibacnet.org/bai2007/proceedings/Papers/2007bai7357.doc>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323-338.
- Andreoni, J, Erard, B., and Feinstein, J. (1998). Tax compliance. *Journal of Economic Literature*, 36, 818-843.
- Armitage, C. J. & Conner, M. (2001). Efficacy of the Theory of Planned Behaviour: A Meta-Analytic Review. *British Journal of Social Psychology*, 40, 471-499.
- Bergman, M. (1998). Criminal law and tax compliance in Argentina: Testing the limits of deterrence. *International Journal of the Sociology of Law*, 26, 55-74.
- Brondolo, J. (2009). *Collecting Taxes During an Economic Crisis: Challenges and Policy Options*. Retrieved from <https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0917.pdf>.
- Cialdini, R. B. & Goldstein, N. J. (2004). Social Influence: Compliance and Conformity. *Annu Rev Psychol*, 55, 591-621.

- Devos, K. (2007). Measuring and Analysing Deterrence in Taxpayer Compliance Research. *Journal of Australian Taxation*, 10 (2), 182-219.
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance*. Retrieved from <http://www.springer.com/us/book/9789400774759>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Pemeriksaan Pajak*. Retrieved from www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Dari 250 Juta Penduduk Indonesia, Baru 25 Juta Yang Punya NPWP*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3345086/dari-250-juta-penduduk-indonesia-baru-25-juta-yang-punya-npwp>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Statistik Amnesti Pajak*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>
- Ebimobowei, A. & Peter, E. G. (2013). A Causality Analysis between Tax Audit and Tax Compliance in Nigeria. *European Journal of Business and Management*, 5 (2), 107-120.
- Eisenhauer, J.G. (2008). Ethical preferences, risk aversion, and taxpayer behaviour. *The Journal of Socio-Economics*, 37, 45-63.
- Evans, C., Carlon, S., & Massey, D. (2005). Record Keeping Practices and Tax Compliance of SMEs. *eJournal of Tax Research*, 3 (2), 288-334.
- Faa, S. G. (2008). *Perlakuan Pemuatan Cukai Individu Di Bawah Sistem Taksir Sendiri*. Retrieved from [http://psasir.upm.edu.my/6927/1/GSM_2008_8\(1-24\).pdf](http://psasir.upm.edu.my/6927/1/GSM_2008_8(1-24).pdf)
- Falsetta, D., Schafer, J. K., & Tsakumis, G. T. (2015). *How Government Spending Impacts Tax Compliance*. Retrieved from <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=945095103005027003070015064011028120109041081065021078070099120089013073000008123029022029039102029056034112113092084122031096102060001069021101118087065098123102084048043111096082127088073031103109019092086092104091097121075089110114122076114020091&EXT=pdf>
- Fatemi, A. H., & Asghari, A. (2012). Attribution Theory, Personality Traits and Gender Differences among EFL Learners. *International Journal of Education*, 4, (2), 181-201.
- Frey, B. S. & Feld, L. P. (2002). *Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis* (Working Paper). Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=341380
- Ghozali, I. (2011). *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2015). *FAQ Structural Equation Modeling (SEM)*. Retrieved November 07, 2017 from <http://imamghozali.com/berita-146-faq-structural-equation-modeling-sem-1.html>
- Gunadi. (2005). *Indonesian Taxation: A Reference Guide*. Retrieved from <http://www.pkf.com/media/1960264/indonesia%20pkf%20tax%20guide%202013.pdf>
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16, 96-104.
- Harris, T. D. (1989). *The effect of type of tax knowledge on individuals' perceptions of fairness and compliance with the federal income tax system: An empirical study* (Doctoral Dissertation). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/35573610_The_effect_of_type_of_tax_knowledge_on_individuals%27_perceptions_of_fairness_and_compliance_with_the_federal_income_tax_system_an_empirical_study
- Hasseldine, J., Kaplan, S.E., & Fuller, L.R. (1994). Characteristics of New Zealand tax evaders: a note. *Accounting and Finance*, 34(2), 79-93.
- Heider. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relation*. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/The_Psychology_of_Interpersonal_Relation.html?hl=de&id=Zh6TDMayL0AC&redir_esc=y
- Hellriegel, D., Slocum, J., & Woodman, R. (1989). *Organizational Behavior: 5th edition*. Retrieved from <https://www.barnesandnoble.com/w/organizational-behavior-don-hellriegel/1100963755>
- Hogan, R. (2015). *Expanded Uncertainty And Coverage Factors for Calculating Uncertainty*. Retrieved from <http://www.isobudgets.com/expanded-uncertainty-and-coverage-factors-for-calculating-uncertainty/>
- Internal Revenues Services (IRS) (2009). *Update on Reducing the Federal Tax Gap and Improving Voluntary Compliance*. Retrieved from http://www.irs.gov/pub/newsroom/tax_gap_report_final_version.pdf
- Junaidi. (2010). *Tabel r*. Retrieved from http://prima.lecturer.pens.ac.id/Pasca/tabel_r.pdf
- Kementerian Keuangan. APBN 2016. (2016). Retrieved from <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behavior*. Retrieved from <https://www.cambridge.org/core/books/the-economic-psychology-of-tax-behaviour/0DA9A8A86C2CC73435A7B6D06E87C596>

- LaMorte, W. W. (2016). *The Theory of Planned Behavior*. Retrieved from <http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/SB/BehavioralChangeTheories/BehavioralChangeTheories3.html>
- Loo, E. C. (2006). *The Influence of the Introduction on Self Assessment on Compliance Behavior of Individual Taxpayers in Malaysia* (Doctoral Dissertation). Retrieved from <https://ses.library.usyd.edu.au/handle/2123/7695>
- Loo, E. C., McKerchar, M., & Hansford, A. (2008). *Tax compliance behavior: Findings derived from a mixed method design* (Paper presented at the 8th International Tax Administration Conference, Sydney). Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813052294>
- Lumumba, O.M., Migwi, S.W. and Magutu, O. (2010). Taxpayers' Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya. *African Journal of Business & Management*, 1, 112-122.
- Lymer, A. & Oats, L. (2009). *Taxation: Policy and Practice*. Birmingham: Fiscal Publication.
- Kemenkeu. (2017). *APBN 2016*. Retrieved from <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>
- Kemenkeu. (2015). *Sadar APBN*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/SadarAPBN>
- Kirchler, E., Muehlbacher, E., Kastlunger, B., & Wahl, I. (2007). *Why Pay Taxes? A Review of Tax Compliance Decision* (Working paper). Retrieved from <http://icepp.gsu.edu/files/2015/03/ispwp0730.pdf>
- Mahyarni. (2013). Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior: Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku. *Jurnal El Riyasah*, 4 (1), 13-23.
- Marziana, M., Norkhazimah, A., & Mohmad, S. D. (2010). Perceptions of Taxpayers With Level of Compliance: A Comparison in the East Coast Region, Malaysia. *Journal of Global Business and Economics*, 1 (1), 241-257.
- McLeod, S. (2012). *Attribution Theory*. Retrieved from <https://simplypsychology.org/attribution-theory>.
- Misu, N. B. (2011). A Review of Factors for Tax Compliance. *Annals of Dunarea de Jos Universiti of Galati*, 1 (17), 69-76.
- Mohamad, M., Ahmad, N., & Deris, S. D. (2010). The Relationship between Perceptions and Level of Compliance under Self Assessment System – A Study in The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economics*, 1 (1), 241-257.

- Moussaid, M., Kameer, J. E., Analytis, P. P., & Neth, H. (2013). *Social Influence and the Collective Dynamics of Opinion Formation*. Retrieved from <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0078433>
- Muliati, N. (2010). *Analisis Data Menggunakan Partial Least Square*. Retrieved from <http://annisty.blogspot.co.id/2010/01/analisis-data-menggunakan-partial-least.html>
- Mulyani, S. (2017). *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah*. Retrieved from <http://wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html>
- Nugent, P. M. S. (2013). *Reference Group*. Retrieved from <https://psychologydictionary.org/reference-group/>
- Nzioki, P. M. & Peter, O. R. (2014). Analysis of Factors Affecting Tax Compliance in Real Estate Sector: A Case of Real Estate Owners in Nakuru Town, Kenya. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5 (11), 1-11.
- Oladipupo, A. O. & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties, and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, 8, 1-9.
- Palil, M.R. (2010) *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia* (Doctoral Dissertation). Retrieved from <http://theses.bham.ac.uk/1040/1/Palil10PhD.pdf>
- Palil, M. R. & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of Tax Compliance in Asia: A Case of Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 24, 7-32.
- Palil, M. R. & Akir, M. R.M., & Ahmad, W. F. (2013). The Perception of Tax Payer on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study The Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1 (1), 118-129.
- Rahma, F. (2012). *Teori-Teori Interaksi Sosial*. Retrieved from <http://faddilarahma.blogspot.co.id/2012/11/teori-teori-interaksi-sosial.html>
- Riahi-Belkaoui, A. (2004). Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 13, 135-143.
- Saad, N., Mansor, M., & Ibrahim, I. (2003). *The self assessment system and its compliance costs*. Paper presented at the Accounting Seminar, Malaysia.
- Sadono, S. (2003). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Saeroji, O. (2017). *Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- Sarwono, J. (2010). Pengertian Dasar Structural Equation Modeling (SEM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 10 (3), 173-182.
- Sarwono, J. (n.d.). *Structural Equation Modeling dengan Pendekatan Kovarian (CBSEM), Partial Least Square (PLSSEM) dan Komponen (GSCA) (Menggunakan Lisrel, SmartPLS, dan Gesca)*. Retrieved from https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.jonathansarwono.info%2Ffaq%2Fsem_kov_pls_komp.pptx
- Sarwono, J. & Narimawati, U. (2015). *Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM)*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Sherman, L. W. (1993). Defiance, Deterrence, and Irrelevance: A Theory of The Criminal Sanction. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 30 (4), 445-473.
- Shertzer, B. & Stone, S. C. (1974). *Fundamentals of Counseling*. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Fundamentals_of_Counseling.html?id=7ycDAAAIAAJ&redir_esc=y
- Simsit, Z. T., Gunay, N. S., & Vayvay, O. (2014). Theory of Constraints: A Literature Review. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 150, 930-936.
- Sirojuddin, A. (2013). *Teori-Teori Pemungutan Pajak*. Retrieved from <http://juraganmakalah.blogspot.co.id/2013/03/teori-teori-pemungutan-pajak.html>
- Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayers Response to an Increased Probability of Audit: Evidence from a Control Experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics*, 79, 455-483.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., Horace, H. R. (1989). *An Introduction to Taxation*. Retrieved from <https://yjadawubi.files.wordpress.com/2014/08/an-introduction-to-taxation.pdf>
- Supriyadi, M. W. (2016). *Aplikasi Ilmu Ekonomi Perilaku untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Retrieved from

<http://www.pajak.go.id/content/article/aplikasi-ilmu-ekonomi-perilaku-untuk-meningkatkan-kepatuhan-pajak>

Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. Retrieved from <http://pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

Suyapto, M. & Lasmana, M. S. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24, 174-186.

Syamsuddin, A. (2010). *Mengapa Pajak Diperlukan*. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Bab%20II%20Mengapa%20Pajak%20Diperlukan.pdf>

The Association of Chartered Certified Accountants. (2009). *The Management of Tax Knowledge*. London: Hasseldine, J., Holland, K. and Rijt, P.V.

Thiga, M. N. & Muturi, W. (2015). Factors That Influence Compliance With Tax Laws among Small and Medium Sized Enterprises in Kenya. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 5 (6), 1-12.

Torgler, B. & Schneider, F. (2005). Attitudes toward Paying Taxes in Austria: An Empirical Analysis. *Empirica*, 32 (2), 231-250.

Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: EE.

Wade, C., & Tavris, C. (1993). *Psychology: 4th edition*. New York: Harper Collins.

Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4, (1), 1-13.

Warneryd, K. E. & Walerud, B. (1982). Taxes and economic behaviour: Some interview data on tax evasion in Sweden. *Journal of Economic Psychology*, 2, 187-211.

Wong, K. & Kwong, K. (2013). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Techniques using SmartPLS. *Marketing Bulletin*, 24, 1, 1-32

World Bank. (2009). *Linking business tax reform with governance: How to measure success* (Working Paper). Washington DC: Everest-Phillip, M., & Sandall, R.

Zohrabi, M. (2013). Mixed Method Research: Instruments, Validity, Reliability and Reporting Findings. *Theory and Practice in Language Studies*, 3 (2), 254-262.

HASIL PEMERIKSAAN TURNITIN

NAMA : CHRISTINA MAGDALENA

NIM 127151015

RAB I
PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Pejak merupakan sumber pendapatan negara yang berperan penting bagi terlaksananya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Penarikan pajak dari sektor pajak sebesar 86,73%

21%	
1	10%
2	10%
3	10%
4	10%
5	10%
6	10%
7	10%
8	10%
9	10%
10	10%

PEMBIMBING

Mengetahui


Dr. Jonnandi, drs, MML, Ak., BAP

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI


Dr. Herman Ruslim, SE., MM., Ak., CA, CPA, MAPPI (Cert.)